

BAB II

PROFIL NEGARA SRI LANKA

A. Sejarah

Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, dahulu Sri Lanka merupakan sebuah kerajaan dengan penduduk asli etnis Sinhala. Mereka menggunakan sistem kasta, mengingat pengaruh Budha yang sangat kental yang sebelumnya sudah lebih dulu ada di tanah ini sejak abad ke-6 Masehi. Berdasarkan data yang ada, terdapat asumsi bahwa dahulu etnis yang kini merupakan etnis mayoritas di Sri Lanka, yaitu Tamil dan Sinhala, hidup secara harmonis di awal-awal perkembangannya.

Kedamaian dan stabilitas “pulau” ini pertama kali terusik ketika dua petualang dari India selatan merebut takhta kerajaan Sinhala, yaitu Anuradhapura. (Federal Research Divison Library of Congress, 1990) Perampasan kekuasaan ini kemudian menandai pertama kalinya Anuradhapura dipimpin oleh etnis Tamil. Namun, keduanya lalu dibunuh dan kepemimpinan dinasti Sinhala pun kembali. Perebutan kekuasaan antara kedua etnis ini bukan hanya terjadi sekali, namun berkali-kali dengan alur cerita yang kurang lebih sama.

Kemunduran masa kejayaan Sinhala pun berada di kisaran tahun 1200-1500 Masehi. Etnis ini diketahui menarik diri dari wilayah utara menuju selatan Sri Lanka yang kemudian dihubung-hubungkan dengan invasi dan ekspansi Tamil dari India selatan di daerah utara Sri Lanka. Kelemahan ini pun digunakan oleh Tamil untuk mengembangkan daerah

utara Sri Lanka dan menanamkan budaya etnis Tamil di wilayah tersebut. Di masa-masa ini telah banyak kekuasaan –kekuasaan asing yang mencoba masuk ke Sri Lanka untuk mencari keuntungan bagi negara atau kerajaan masing-masing. Ketidakstabilan kekuasaan Sinhala pun menandai berakhirnya kejayaan etnis ini.

Ketika era kerajaan ini berakhir, era baru pun muncul. Era baru yang dimaksud adalah era dominasi Eropa yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1500-1948. Di akhir abad ke-15 Masehi, Portugis yang telah membangun dominasinya sebagai kekuatan maritim di wilayah Atlantik melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Vasco da Gama pada tahun 1497. Ia kemudian menemukan rute yang menghubungkan Eropa dengan India.

1. Penjajahan Bangsa Portugis (1505-1658)

Sebuah misi kolonial Portugis tiba di pulau pada tahun 1505 dipimpin oleh Lourenço de Almeida anak Francisco de Almeida. Pada saat itu, terdapat tiga kerajaan yang tengah berkuasa, yakni Kandy di tengah perbukitan, Kotte di pantai Barat, dan Yarlpanam (atau sekarang disebut Jaffna) di utara. (History of Sri Lanka, 2007) awalnya, Laurenco de Almeida membangun hubungan baik dengan Raja Kotteagar dapat mendapat izin melakukan kegiatan perdagangan rempah-rempah, terutama kayu manis, yang memiliki nilai jual tinggi di wilayah Eropa.

Kegiatan perdagangan yang dilakukan Portugis berjalan mulus dengan perlindungan yang diberikan oleh Raja Kotte. Walaupun di akhir tahun 1530 persaingan dan perebutan monopoli perdagangan sempat terjadi dengan para pedagang Muslim yang datang dari Arab, namun Portugis dapat menanganinya dengan baik dan memukul mundur pedagang Arab. Meskipun kedatangannya berawal dari ketertarikannya terhadap rempah-rempah di Sri Lanka, tak dapat di pungkiri bahwa ekspedisi mereka ke Asia membawa misi kolonialisasi dan kristenisasi.



Sumber: <http://www.srilankamuslims.org>

Gambar 2.1 Wilayah kekuasaan bangsa Portugis

Portugis pun memastikan bahwa wilayah yang mereka sebut Cilao itu memberikan keuntungan strategis bagi Portugis dalam rangka melindungi dan memperkuat dominasi nya di jalur perdagangan Samudera Hindia (Federal Research Division Library of Congress, 2006). Upaya ini pun dilakukan berkali-kali untuk

menaklukkan ketiga wilayah yang dikuasai oleh 3 kerajaan kala itu. Kotte dengan ketergantungannya pada Portugis dalam urusan politik internal, kerajaannya dengan mudah dapat ditaklukkan. Kemudian pada tahun 1560, Portugis mendatangkan 1200 prajurit untuk menaklukkan Jaffna. Namun gagal. Lalu pada tahun 1565 Portugis memutuskan untuk memindahkan ibukota ke Colombo sementara Kotte terabaikan.

Setelah memindahkan pusat pemerintahan ke Colombo, pada tahun 1587 Portugis dikepung oleh pasukan Raja Sinhala yang merupakan Raja Kandy. Namun karena militer dan benteng-benteng yang dibangun oleh Portugis cukup kuat, serangan yang dilancarkan berkali-kali oleh kerajaan Kandy selalu gagal dan akhirnya pada Februari 1588, Kandy memutuskan untuk mundur.

Sementara itu, Jaffna yang sempat gagal dikuasai kemudian coba kembali dikuasai oleh Portugis pada tahun 1591 dengan dorongan dan bantuan misionaris Kristen. Setelah berhasil menanamkan paham Kristen yang cukup kuat di Jaffna dan mengatur pemerintahan Jaffna lewat Raja boneka, wilayah ini kemudian benar-benar bisa diambil alih oleh Portugis pada tahun 1619.

Selain Jaffna, Kandy menjadi mangsa Portugis selanjutnya. Setelah berhasil diduduki oleh salah seorang pewaris dari Kerajaan Kotte di tahun 1580, dimana ia juga sangat bergantung pada Portugis. Lalu pada tahun 1591, bersamaan dengan ekspedisi Portugis ke Jaffna,

mereka melakukan strategi yang sama dengan yang digunakan untuk menaklukkan Jaffna dan Kotte. Mereka berhasil menyusupkan “orangnya” di posisi Ratu Kandy. Tetapi ia tak dapat melakukan hal-hal yang berarti. Selama hampir setengah abad, Portugis mati-matian mencoba meluaskan pengaruhnya di Kandy. Namun selalu gagal. Kegagalan ini menjadikan Kandy satu-satunya Kerajaan yang tidak dikuasai oleh Portugis kala itu.

Setelah lebih dari 150 tahun berada di Sri Lanka, Portugis menghadapi masa-masa akhir kekuasaannya di wilayah ini. Sekitar tahun 1656, Belanda mengusir Portugis dari Sri Lanka dengan bantuan dari Raja Kandy.

2. Penjajahan Bangsa Belanda (1640-1796)

Belanda diperkirakan masuk ke wilayah Sri Lanka pada tahun 1602, posisinya bisa disejajarkan dengan Portugis dalam hal dominasi lalu lintas perdagangan rempah-rempah di Samudera Hindia. 1796 (History of Sri Lanka, 2009) Namun secara resmi Belanda memulai kekuasaannya atas tanah Sri Lanka pada tahun 1640 hingga 1796 (Pieris, 2012). Berpusat di Batavia, Indonesia kala itu, Belanda berkeinginan untuk merebut kontrol perdagangan rempah-rempah dari Portugis. Belanda menggunakan strategi yang cukup sederhana, yaitu dengan bekerjasama dengan musuh Portugis di Sri Lanka yang tidak kunjung dapat dikuasai, yaitu kerajaan Kandy.

Belanda memulai negosiasinya dengan Kandy pada tahun 1638 yang menghasilkan perjanjian bahwa Kandy menjamin adanya bantuan dari raja Kandy dalam perang melawan Portugis dalam rangka pertukaran monopoli perdagangan utama di pulau itu, terutama kayu manis. Selain itu, sang raja juga berjanji untuk membiayai segala kebutuhan terkait perang antara Belanda dan Portugis nantinya. Portugis di paksa keluar dari benteng-benteng mereka. (Federal Research Division Library of Congress, 2006)

Pada dasarnya perjanjian kedua belah pihak ini adalah memberikan benteng-benteng Portugis kepada Raja Kandy. Tapi bukannya memberikan benteng-benteng tersebut, Belanda justru menahannya dan memperkuat pertahanan benteng tersebut. Belanda berhasil mengambil alih wilayah-wilayah seperti Colombo di tahun 1656, kemudian Mannar dan Jaffan di tahun 1658, Kalpitiya setahu setelahnya dan, Tricomalee di tahun 1665, lalu Batticaloa and Kottiyar pada tahun 1668. (Pieris, 2012)

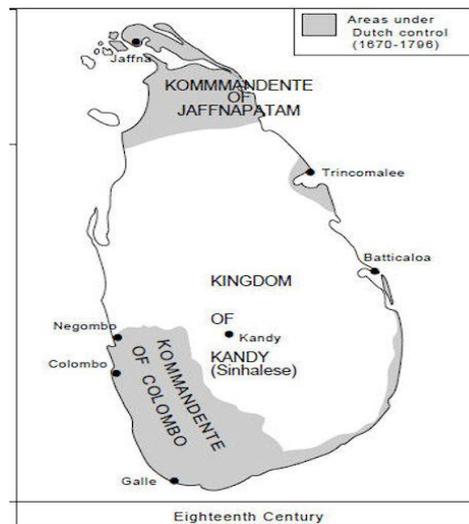
Pelabuhan-pelabuhan penting dibagian timur dikembalikan ke Sinhala. Namun, Belanda menolak menyerahkan pelabuhan di bagian barat daya Galle dan Negombo kepada Sinhala yang berhasil dikuasai tahun 1640 dengan alasan bahwa Raja Kandy tidak memberikan biaya yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran militer mereka untuk mengusir Portugis dari Sri Lanka. Alasan ini memungkinkan Belanda dapat memegang kendali wilayah

penghasil kayu manis terkaya di pulau itu. Taktik lainnya adalah dengan menunjukkan “tagihan pengeluaran” yang digunakan oleh Belanda untuk membantu Kandy melawan Portugis dimana jumlahnya tidak akan mungkin bisa dibayar oleh raja tersebut (Federal Research Division Library of Congress, 2006).

Setelah pertempuran yang cukup panjang dan melelahkan, bangsa Portugis akhirnya menyerah dan menyerahkan Colombo pada tahun 1656 dan Jaffna yang merupakan benteng terakhir mereka pada tahun 1658. Adanya kekuatan ekonomi dan militer yang kuat memungkinkan Belanda mendominasi dan memegang kendali jalur perdagangan di wilayah Samudera Hindia. Bahkan Belanda diketahui menyerang dan memukul mundur Bangsa Portugis di semua wilayah Asia Selatan. (Federal Research Division Library of Congress, 2006)

Melihat hasil yang ia dapatkan segera setelah Portugis angkat kaki dari Sri Lanka, Raja Kandy menyadari bahwa ia hanya mengganti musuh lama dengan musuh baru. Kemudian ia melanjutkan rencana penghasutan dan pemberontakan yang sempat ia lakukan untuk melawan Portugis dengan target baru, yaitu Belanda. Raja Kandy bahkan sempat berusaha bersekutu dengan Inggris dalam usahanya untuk mengusir Belanda dari tanah kekuasaannya. Upaya ini menghasilkan sebuah pemberontakan besar terhadap dirinya sendiri pada tahun 1664. Ketidakstabilan ini sangat menguntungkan bagi Belanda hingga mereka dapat mengambil pelabuhan-pelabuhan yang

tersisa dan benar-benar mengepung Kandy dengan tujuan agar kerajaan ini tidak dapat melakukan kerja sama atau bersekutu dengan kekuatan asing lain untuk melawan Belanda.



Sumber: GlobalSecurity.org

Gambar 2.2 Wilayah Kekuasaan Belanda

Strategi ini kemudian digabungkan dengan berbagai tekanan yang diberikan oleh Belanda, mampu menaklukkan raja-raja Kandy. Kerajaan ini tidak lagi bisa memberikan perlawanan yang berarti dan signifikan terhadap penjajahan yang dilakukan Belanda. Keduanya duduk diam setelah dibuatnya perjanjian antara keduanya untuk tidak saling menyerang dengan beberapa syarat. Hal ini dipengaruhi adanya pertentangan perluasan wilayah oleh markas utama mereka di Batavia (Jakarta). Dikatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menaklukkan dan mengelola daerah yang luas dan tidak menginginkan wilayah yang tidak bisa mereka kelola. Belanda di Sri Lanka diperintahkan untuk berkonsentrasi pada perdagangan,

terutama kayu manis dan gajah. Untuk itulah hubungan keduanya harus selalu dalam kondisi damai, agar kepentingan Belanda terkait perdagangan dapat berjalan dengan baik tanpa harus mengerahkan pasukan militer.

Namun ini bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh Belanda. Mereka harus bisa mentolerir semua kemauan Raja Kandy di wilayah mereka, mengingat mayoritas penduduk di wilayah milik Belanda kala itu merupakan etnis Sinhala yang merupakan etnis yang berkuasa di kerajaan Kandy. Tekanan secara tidak langsung coba diberikan oleh Kandy terhadap Belanda. Bahkan setiap kenaikan takhta, Belanda terpaksa harus ikut turun ke jalan dan merayakannya demi menyenangkan hati sang raja. Semua itu mereka lakukan agar dapat terus diizinkan melakukan ekspor kayu manis dan rempah-rempah lain dari Sri Lanka yang kebanyakan rempah-rempah berkualitasnya berasal dari daerah ini.

Pada akhirnya Kandy masih mampu menjadi wilayah yang merdeka meskipun tidak mudah karena harus berdampingan dengan Belanda hingga 1760 akhirnya kedua belah pihak kembali berperang karena penduduk Sinhala di daerah kekuasaan Belanda cenderung lebih patuh pada Raja Kandy. Bahkan mereka siap melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap Belanda jika suatu saat raja mereka merasa itu perlu. Belanda memenangkan perang tersebut dan memaksa Kandy untuk menyetujui sebuah perjanjian yang sangat

tidak adil bagi mereka. Kandy dipaksa untuk menerima dan mengakui kedaulatan Belanda terhadap seluruh wilayah di Sri Lanka, meskipun sebelumnya wilayah tersebut adalah milik kerajaan ini. (Lambert, 2010)

Kandy yang menganggap perjanjian tersebut sangat merugikan pun perlahan menyusun strategi untuk mengusir Belanda keluar dari Sri Lanka. Mereka kemudian memutuskan mencari bantuan asing untuk mengusir musuh mereka. Mereka pun mendekati Inggris pada tahun 1762, 1782, dan 1795. Di awal-awal misinya yang untuk mendekati Inggris sempat gagal, namun pada tahun 1795, Inggris mengirim utusan dan menawarkan perjanjian jika ingin Belanda keluar dari Sri Lanka. Imbalannya antara lain adalah kepemilikan pelabuhan perdagangan di Sri Lanka serta kontrol perdagangan di wilayah tersebut, terutama kayu manis. Karena Kandy tak dapat menemukan solusi yang lebih baik, maka Kandy setuju dan akhirnya Inggris berhasil menggulingkan Belanda tanpa bantuan yang signifikan pada tahun 1796 (Federal Research Division Library of Congress, 2006).

3. Penjajahan Bangsa Inggris (1796-1948)

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Belanda memaksa kerajaan Kandy untuk menandatangani sebuah perjanjian. Kemudian dengan bantuan Inggris pun Belanda menyerah dan meninggalkan Sri

Lanka 30 tahun kemudian. Keputusan kerajaan ini untuk mencari bantuan asing dalam rangka mengusir Belanda merupakan suatu kesalahan, karena pola yang sama kembali terjadi saat Kandy meminta bantuan Belanda untuk mengusir Portugis. Inggris pun akhirnya menempati posisi Belanda dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Belanda sebelumnya.

Inggris muncul sebagai pemimpin di era baru Revolusi Industri, inovasi teknologi, inovasi ekonomi, dan imperialisme nya yang telah tersebar luas. Bangsa-bangsa yang menjadi aktor imperialisme di awal-awal era imperialisme Eropa telah menghadapi masa-masa kehancurannya.

Tak lama setelah resmi datang pada tahun 1796, Inggris menjalin kontak dengan raja Kandy dan memutuskan untuk menjadi “pelindung” kerajaan menggantikan Belanda. Ketika Inggris telah berkuasa, mereka menyadari bahwa membiarkan kemerdekaan kerajaan Kandy menimbulkan sebuah masalah. (Encyclopaedia Britannica, 2017) Salah satunya adalah perbatasan dengan Kandy yang harus dijaga dengan banyak pengorbanan terutama materiil, selain itu juga komunikasi antara wilayah timur dan barat akan lebih mudah dan cepat jika pembangunan jalan yang melewati tengah pulau dapat segera direalisasikan.

Usaha untuk menaklukkan Kandy dilakukan pertama kali oleh Inggris pada tahun 1803, walaupun berakhir dengan kegagalan

karena raja Kandy kala itu memiliki begitu banyak kekuatan dan bantuan dari wilayah-wilayah luar yang telah bersatu sebelumnya untuk berjaga-jaga jika Inggris menyerang mereka di kemudian hari. Kesempatan lain datang ketika ada perselisihan antar pihak-pihak di dalam kerajaan, dan Inggris perlahan pun mencampuri urusan kerajaan Kandy. Dengan bantuan salah satu menteri kerajaan yang telah lama memiliki hubungan buruk dengan sang raja, Kandy pun dapat ditaklukkan pada tahun 1815. Raja yang tengah menjabat kali itu merupakan raja terakhir setelah total 181 raja memerintah Sri Lanka sejak zaman Anuradhapura hingga Kandy. Hal ini disebabkan karena sejak tahun itu pula semua wilayah berada dalam pemerintahan kolonial Inggris.



Sumber: <http://www.british-history.ac.uk>

Gambar 2.3 Wilayah Kekuasaan Inggris

Perwakilan dari Kandy dan Inggris kemudian menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan *Kandyan Convention* di tahun yang sama. Perjanjian itu berisi bahwa wilayah Kandy berada dibawah kedaulatan Inggris serta semua hak dan kebudayaan tradisional akan tetap dipertahankan. Singkatnya, sistem lama bisa tetap dilanjutkan, namun kedepannya cenderung patut dipertanyakan karena perbedaan prinsip-prinsip pemerintahan kedua belah pihak. Maka dari itu, Inggris lantas mengenalkan sistem baru dengan sangat hati-hati. Ini menyebabkan hal-hal dan kebiasaan yang berbau Buddha sedikit demi sedikit dihilangkan.

Merasa tidak sepaham dengan Inggris, para biksu kemudian mulai membangkitkan semangat pemberontakan segera setelah aneksasi yang Inggris lakukan. Pemberontakan pun terjadi pada tahun 1818. Setelah dapat diredakan, pengawasan terhadap Kandy diperketat juga pembatasan hak-hak mereka. Peristiwa ini menandai untuk pertama kalinya Kandy jatuh dibawah kendali satu kekuatan asing.

Meskipun enggan membuat gejolak lembaga-lembaga tradisional milik Sinhala, Inggris dengan cepat melakukan proses reformasi, seperti penghapusan perbudakan. Pengembangan produksi kayu manis, lada, tebu, kapas, dan kopi. Begitu juga dengan peningkatan aktivitas misionaris Kristen dalam mengembangkan dan menyebarkan agamanya.

Perubahan awal dibawah kekuasaan Inggris yang dibarengi oleh serangkaian reformasi yang sistematis mulai diberlakukan pada tahun 1833, serta peletakan dasar bagi struktur politik dan ekonomi berikutnya bagi Ceylon. Ceylon sendiri merupakan sebutan yang diberikan oleh Inggris kepada Sri Lanka kala itu. Selain itu, penyesuaian dan pembagian tugas lembaga eksekutif dan legislatif pun dilakukan. Bahasa Inggris kemudian menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan sekaligus bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Inggris benar-benar menanamkan paham demokrasi dan kebebasan individu.

Selain paham demokrasi dan kebebasan individu, paham kapitalisme juga menjadi salah satu agenda Inggris dalam mereformasi sistem ekonomi Ceylon. Mereka memperkenalkan perdagangan bebas. Tanah-tanah yang dahulu menjadi hak milik Inggris dijual kembali kepada penduduk lokal dengan harga murah. Tujuannya untuk mendorong sektor pertanian dan perkebunan.

Hingga pertengahan abad ke-19, kopi menjadi pelopor pembangunan ekonomi di Ceylon. Area budidayanya pun diperluas, pembangunan jalan agar mempermudah proses pemasaran. Tenaga kerja tambahan dikirim dari India bagian selatan dalam jumlah yang besar di tahun 1840an. Namun pada tahun 1870an, perkebunan kopi melemah dikarenakan munculnya hama. Mereka kemudian beralih ke perkebunan teh, dan berhasil di percobaan pertama. Di waktu yang

kurang lebih sama, karet dan kelapa juga dibudidayakan sebagian tanaman perkebunan.

Teh dan karet kemudian menarik investasi dalam jumlah besar, dan menciptakan pertumbuhan industri skala besar. pertumbuhan ini sekali lagi menuntut adanya tenaga kerja tambahan. Langkah-langkah tambahan pun segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perluasan wilayah di pelabuhan Colombo, pembangunan rel kereta api dan konstruksi jalan pun menjadi salah satu keharusan mengingat terus meningkatnya aktivitas ekspor dan perdagangan.

Pembangunan yang terus menerus berlangsung dan berkembang pun pada akhirnya memunculkan kalangan kelas menengah di masyarakat Inggris. Sama halnya dengan terus bertambahnya jumlah kaum intelektual yang perlahan kemudian menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Begitu pula dengan kebangkitan agama Budha dan Hindu menimbulkan banyak tuntutan agar orang-orang Ceylon juga bisa ikut berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan tidak lagi serta merta dikendalikan oleh kaum Inggris.

a. Munculnya Nasionalisme di Sri Lanka

Di tahun 1880-an, sebuah perhimpunan Reformasi Sosial Ceylon yang dimotori oleh pemeluk agama Buddha melakukan gerakan pemberantasan kegiatan mabuk-mabukan dan

menjadi gerakan yang berusaha menghapus segala hal yang terkait dengan westernisasi di Ceylon di tahun 1905. Hal ini sebagian besar juga disebabkan bahwa kebiasaan dan kebudayaan yang dibawa oleh Inggris ke Ceylon dianggap tidak sesuai dan melanggar norma, adat istiadat, serta agama di Ceylon terutama agama Buddha.

Awal abad ke-20 merupakan salah satu momen penting bagi gerakan nasionalis rakyat Ceylon. Penyebaran agama Hindu dan Buddha kembali digerakkan dengan tujuan untuk mengalahkan misionaris Kristen untuk menyebarkan agama yang dibawa oleh negara-negara Eropa ke tanah Ceylon . Dua agama ini bukan hanya sekedar agama bari Ceylon, tapi telah menjadi bagian dari budaya Sri Lanka yang dirasa patut untuk dilestarikan dan dipertahankan.

Di sektor pemerintahan, tuntutan rakyat Ceylon untuk bisa secara signifikan berpartisipasi dalam urusan negara mereka pun terjadi di tahun 1910 ketika mereka mengirimkan petisi ke pemerintah colonial Inggris. Isi dari petisi tersebut adalah permintaan rakyat Ceylon agar di izinkan memiliki perwakilan di badan eksekutif dan badan legislatif. Tak lama setelah pengiriman petisi, Inggris memberikan kelonggaran bagi rakyat Ceylon untuk mengirimkan salah satu perwakilan mereka untuk duduk di badan legislatif.

Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 tak memberi dampak berarti pada Ceylon yang kala itu telah resmi menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. Hal ini disebabkan karena medan perang yang paling dekat dengan wilayah ini adalah di sekitar Teluk Benggala, dimana kapal perang Australia ditenggelamkan oleh kapal Jerman. Namun Perang Dunia ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan nasionalisme Sri Lanka. Propaganda Sekutu yang mengeluh-eluhkan betapa pentingnya kemerdekaan dan penentuan nasib negeri sendiri, sampai ke telinga nasionalis Ceylon. Kemudian propaganda inilah yang semakin membakar semangat nasionalisme rakyat Ceylon untuk dapat memerdekakan negerinya.

Setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1915 muncul kerusuhan dan bentrokan antara pemeluk agama Buddha yang kebanyakan berasal dari etnis Sinhala dengan kaum minoritas Muslim Indian Moors di Pantai Barat Ceylon. Perlu diketahui bahwa Muslim di Ceylon terbagi menjadi dua, yaitu Indian Moors dan Ceylon Moors. Indian Moors merupakan muslim yang berasal dari India Selatan dan bermigrasi dan menetap di Ceylon dengan tujuan berdagang. Sedangkan Ceylon Moors merupakan Muslim yang merupakan pedagang-pedagang asal Arab yang menetap selama lebih dari 5 abad sebelum Indian Moors datang ke Ceylon untuk berdagang (Edward Hughes and Co, 2007). Awal mula dari

kerusuhan ini adalah penolakan Muslim Moors terhadap salah satu prosesi ibadah umat Buddha, yaitu ritual Perahera dimana prosesi tersebut menggunakan alat musik dan nyanyian sambil berjalan. Hal ini menjadi masalah ketika prosesi yang dilakukan kerap kali melewati masjid milik Indian Moors di waktu-waktu shalat.

Setelah berdiskusi, umat Buddha setuju untuk mengubah waktu pelaksanaan prosesi agar tidak mengganggu kegiatan di masjid, namun tetap menolak melanjutkan diskusi jika mereka dilarang melakukan ritual tanpa musik. Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena ritual beserta musik yang dibawakan merupakan bagian dari prosesi yang nantinya akan menghilangkan makna dari ritual itu sendiri jika tidak menggunakan musik. Namun pengurus masjid Indian Moors tetap bersikeras bahwa penggunaan musik itu mengganggu kegiatan mereka. Sementara masjid-masjid milik Ceylon Moors yang berada di rute yang sama, tidak pernah merasa keberatan apalagi hingga protes.

Permasalahan ini bahkan dibawa hingga ke tingkat Mahkamah Agung, dan dimenangkan oleh Indian Moors. Lalu pada tanggal 28 Mei 1915, bertepatan dengan waktu pelaksanaan ritual Perahera, umat Buddha pun melaksanakan ritual tersebut setelah mengantungi izin dari otoritas keamanan setempat.

Namun ketika akan melewati masjid milik Indian Moor, mereka dihalangi dan terjadilah perdebatan. Petugas keamanan yang kala itu dipimpin oleh F.T. Coore pun meminta umat Buddha untuk berbalik arah demi meredam kerusuhan. Yang terjadi ketika mereka berbalik adalah hinaan dan cemoohan yang keluar dari mulut Muslim India ini. Hal ini yang memprovokasi umat Buddha Sinhala untuk kembali dan menyerang Indian Moor pada malam hari. Massa pun memaksa masuk ke dalam masjid dan merusak tempat ibadah tersebut meskipun tidak aja korban jiwa.

Mengetahui kejadian tersebut, Inggris panik dan mengira keributan ini adalah bagian dari konspirasi gerakan anti pemerintah yang kembali bangkit setelah mengetahui bahwa Inggris kalah dalam Perang Dunia I dan mengira mayoritas rakyat Ceylon menjadi pendukung Jerman. Inggris kemudian menangkap begitu banyak orang-orang Sinhala termasuk tokoh pentingnya yaitu D.S Senanayake yang di kemudian hari menjadi Perdana Menteri Sri Lanka yang pertama setelah merdeka. Faktanya, D.S Senanayake justru merupakan salah satu orang yang menggunakan kekuasaannya untuk meredam kerusuhan yang tengah terjadi. Kepanikan Inggris yang berlebihan serta bertindak brutal. Beberapa telah dieksekusi mati bahkan sebelum vonis dijatuhkan. Sisanya mati di penjara atau bahkan dinyatakan hilang. Peristiwa ini pun menjadi titik balik bagi gerakan nasionalisme

Ceylon. Setelah peristiwa tersebut, para aktivis kerap berkoordinasi dan mempersiapkan rencana untuk melawan dan mengusir Inggris dari tanah mereka.

Gerakan nasionalis yang telah ada sebelumnya di India kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalis di Sri Lanka (Federal Research Division Library of Congress, 2006). Dari gerakan nasionalis India lah mereka belajar bahwa rasa nasionalisme adalah hal yang penting dimiliki oleh setiap individu. Dan sekitar tahun 1919, beberapa organisasi politik yang terdiri dari Sinhala dan Tamil pun bersatu dan sepakat untuk mendirikan Ceylon National Congress. Salah satu langkah yang dilakukan oleh kongres ini adalah pengajuan berkas yang berkaitan dengan perubahan konstitusi Ceylon, meskipun pengajuan tersebut ditolak oleh Inggris.

Namun, di tahun 1920, Inggris memberikan izin perencanaan dan perubahan konstitusi Ceylon. Amandemen yang dilakukan pada 1924 meningkatkan peran Ceylon dalam urusan negara. Meskipun tuntutan mereka terkait perwakilan mereka di lembaga eksekutif tidak dikabulkan oleh Inggris, namun keanggotaan dalam lembaga legislative bertambah termasuk perwakilan yang bukan berasal dari kelompok mayoritas. Hal ini semakin mendekatkan mereka dengan urusan pemerintahan. (Federal Research Division Library of Congress, 2006). Hingga

pada tahun 1927, Inggris membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan Ceylon yang dipimpin oleh Donoughmore, dimana ia merupakan salah satu bangsawan asal Irlandia Utara.

b. Komisi Donoughmore

Komisi ini dibentuk oleh Inggris yang dibentuk untuk membantu persiapan kemerdekaan Ceylon serta membantu hal-hal terkait perubahan konstitusi yang diperlukan untuk dapat berdiri dan memiliki pemerintahan sendiri. meskipun sebenarnya rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komisi ini enggan diterima oleh politisi Ceylon. Namun, pada tahun 1931, konstitusi buatan Komisi Donoughmore ini diresmikan oleh Inggris sebagai dasar konstitusi jika bagi Ceylon yang ingin merdeka. Lampiran juga disertai dengan dokumen pelatihan pemerintahan sendiri bagi Ceylon. Lalu, dibentuklah komite-komite yang terdiri dari gabungan antara orang Inggris dan Ceylon yang diambil dari semua etnis pun dibentuk untuk merepresentasikan kementerian dengan satu orang dari Ceylon sebagai ketua atau berperan layaknya seorang menteri. Orang-orang Ceylon ini berperan semakin dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan di parlemen, dan menjamin hak pilih secara menyeluruh dan universal, terkecuali bagi buruh imigran dari India.

Tidak ada etnis yang mendominasi proses politik kala itu, baik Sinhala maupun Tamil yang merupakan dua etnis utama Ceylon bahkan hingga saat ini. Masalah mulai hadir ketika sejumlah sektor penting justru dikendalikan oleh orang Inggris. Sektor-sektor tersebut adalah pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, dan hal-hal mengenai administrasi hukum dan peradilan. Hal ini memicu ketidakpuasan dan kritik di kalangan rakyat Ceylon terhadap Inggris dan konstitusi buatannya.

c. Pengaruh Perang Dunia II terhadap Sri Lanka

Di tahun 1942, Ceylon menduduki posisi penting bagi Inggris sebagai pangkalan militer Sekutu selama Perang Dunia II. Jumlah armada kapal perang yang cukup besar milik Inggris dan Amerika pun berada di wilayah ini, belum lagi 10.000 tentara dikerahkan untuk melawan Jepang di Asia Tenggara. (History of Sri Lanka, 2007).

Jepang sendiri juga mengincar Sri Lanka sebagai benteng pertahanan yang cukup strategis dan krusial bagi sekutu. Berbeda dengan India yang menuntut kemerdekaan negaranya sebagai imbalan atas dukungan mereka dalam perang, Sri Lanka justru mengabdikan dirinya sepenuh hati kepada Sekutu dalam urusan perang kali ini. Meskipun wilayahnya dijadikan benteng peperangan, Inggris dan Sri Lanka menjaga hubungan mereka agar tetap kooperatif. Ketika serangan Jepang mulai berkurang

dan menjelang akhir perang, tuntutan reformasi politik kembali disuarakan oleh kaum nasionalis.

d. Kemerdekaan Ceylon

Konstitusi buatan Komisi Donoughmore pada akhirnya hanya bisa bertahan hingga tahun 1946 karena tuntutan Ceylon untuk menjadi negara merdeka kembali muncul pasca ketidakpuasan mereka terhadap konstitusi tersebut. Tak lama kemudian, konstitusi baru buatan Komisi Soulbury pun diperkenalkan di tahun 1946 yang juga untuk mempersiapkan kemerdekaan Ceylon menggantikan konstitusi yang lama.

Di tahun 1947, Ceylon mengetahui bahwa negara tetangganya, yaitu India telah mendapatkan kemerdekaannya. Peristiwa tersebut membuat kaum nasionalis semakin geram dan meminta kemerdekaan dipercepat oleh Inggris. Akhirnya, di tahun itu pula disusun aturan mengenai Ceylon yang akan segera menjadi negara *dominion*. *Dominion* sendiri merupakan negara pernah dijajah oleh Inggris dan merdeka namun tetap mengakui raja dan ratu Inggris sebagai kepala negara. Negara-negara semacam ini kemudian menjadi bagian dari Negara Persemakmuran Inggris. Tak lama setelah itu, pemerintahan transisi juga dibentuk. Hingga pada tanggal 4 Februari 1948, Ceylon merdeka dengan status *dominion*. Dan pada tahun 1972,

Ceylon menjadi negara Republik dan mengganti namanya menjadi Sri Lanka secara resmi.

4. Konflik Etnis di Sri Lanka (1983-2009)

Etnis Tamil dan Sinhala merupakan etnis yang telah ada sejak zaman Anuradhapura. Dan juga sejak saat itu, kedua etnis ini telah memiliki sejarah yang tidak baik diantara keduanya. Namun yang terbear adalah konflik yang dimulai tahun 1983. Konflik ini merupakan imbas dari diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok Etnis Tamil, bahkan sejak Sri Lanka belum dinyatakan merdeka sepenuhnya. Sinhala selalu menganggap bahwa Sri Lanka adalah milik mereka, dan etnis lain, terutama etnis Tamil, yang dianggap sebagai etnis pendatang harus mengikuti kemauan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang selalu didominasi oleh Sinhala.

Program “*Sinhala Only*” yang dikeluarkan oleh pemerintah di era Perdana Menteri S.W.R.D Bandaranaike tahun 1956, semakin meningkatkan fanatisme etnis mayoritas di Sri Lanka ini. Salah satu isi dari program ini juga menjadikan bahasa resmi Sri Lanka adalah bahasa Sinhala dan agama Buddha sebagai agama utama negara ini.

Pembatasan terhadap etnis Tamil di sektor pemerintahan dan pendidikan juga semakin membuat Tamil tak lagi bisa menahan amarahnya. Pembatasan kuota pendidikan difokuskan pada jurusan kesehatan dan ilmu sains. Jumlah pelajar Tamil yang diizinkan masuk ke pendidikan dokter and teknik berkurang hingga 50% dari tahun

sebelumnya. Begitu pula dengan sektor pemerintahan, yang semula sebesar 41% di tahun 1949 lalu jatuh di angka sekitar 7% di tahun 1963. Selain itu, hanya sekitar 5% yang bisa diterima masuk kepolisian atau militer. Hingga tahun 1970-an, hanya 6% tenaga pengajar di bidang sains yang berasal dari Tamil. (Sri Lanka - History & Background, 2017)

Mereka yang kebanyakan bermukim di daerah utara dan timur wilayah Sri Lanka, kemudian sepakat mendirikan kelompok pemberontakan dengan tujuan memisahkan diri dari Sri Lanka dan membentuk negara sendiri. Kelompok itu didirikan pada tahun 1976 dengan nama Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Lambert, 2010). Walaupun pada tahun 1978, konstitusi baru diperkenalkan, hal ini tetap tidak membuat Tamil puas. Meskipun bahasa Tamil diresmikan menjadi ‘bahasa nasional’, namun bahasa ini tidak benar-benar menjadi bahasa nasional karena bahasa ini hanya digunakan di wilayah-wilayah dimana mayoritas etnis ini berada (History of Sri Lanka, 2009).

Konflik mulai memanas ketika pada tahun 1981, beberapa orang Sinhala membakar perpustakaan di Jaffna. Perpustakaan ini bukanlah perpustakaan seperti pada umumnya, karena tempat ini menyimpan sejarah kuno milik orang-orang Tamil. Beberapa bahkan masih menggunakan daun dan kulit kayu sebagai media penulisan. Serangan ini pun dibalas oleh Tamil namun tidak dalam skala kecil.

(History of Sri Lanka, 2009) Banyak pihak yang tidak menuliskan tentang penyerangan ini sehingga terlihat seperti Tamil lah yang memulai konflik. Konflik yang sebenarnya dimulai pada bulan 23 Juli tahun 1983 yang kemudian dikenal dengan *Black July*, ketika LTTE menyerang dan membunuh 13 pasukan patroli Sri Lanka (Rawat, 2012). Gerakan anti Tamil pun meluas di daerah Colombo saat itu. korban tewas dan terluka dari pihak Tamil berjumlah lebih dari 3000. Beberapa di pukuli secara brutal, dibakar atau bahkan ditembak mati. Selain penyerangan dan pembantaian, wilayah-wilayah di sekitar Colombo dimana masyarakat Tamil tinggal pun dihancurkan dengan total 10 ribu orang kehilangan tempat tinggal mereka. Setelah peristiwa tersebut, LTTE kerap menyerang pemerintah dan tak jarang, warga sipil, sembari memperluas daerah kekuasaan di utara dan timur Sri Lanka. Pemerintah pun kembali berusaha meredam dan berakibat jatuhnya korban tewas dari kedua belah pihak. Rentetan peristiwa ini kemudian dijuluki '*First Eelam War*' oleh LTTE. (Rawat, 2012)

Pola penyerangan dan balas dendam pun tak henti-hentinya terjadi diantara kedua belah pihak. Melihat perang sipil ini mulai memakan banyak korban, pemerintah mencoba untuk meredam konflik ini lewat perundingan dengan pihak LTTE pada tahun 1985 dan gagal. Ratusan bahkan ribuan warga etnis Tamil meninggalkan wilayah-wilayah mayoritas Sinhala dan memilih untuk tinggal di daerah utara dan timur Sri Lanka bahkan ke India selatan, begitu juga

sebaliknya. Pembantaian ini mengundang simpati dari Perdana Menteri India, Indira Gandhi yang kemudian memberikan bantuan dana kepada para pengungsi Tamil di India selatan pada tahun 1984.

Pada tahun 1987, upaya pemerintah dengan bantuan luar pun dimulai. Sri Lanka melibatkan India dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Keterlibatan India dalam penyelesaian konflik ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Indo-Sri Lankan (*Indo-Sri Lankan Peace Agreement*) pada 29 Juli 1987 antara Perdana Menteri Rajiv dan Presiden Sri Lanka, J.R Jayawardane. selain itu, India juga mengirimkan sebanyak 60 ribu tentara yang tergabung dalam *Indian Peace Keeping Force* (IKPF) ke wilayah Tamil guna mengamankan dan mengontrol proses gencatan senjata. Meskipun kondisi sempat kondusif, hal tersebut tidak berlangsung lama. Tugas dari IKPF adalah menangkap pasukan pemberontak yang masih ada, namun selama dua tahun keberadaan mereka di Sri Lanka, tentara India justru telah melakukan pembunuhan terhadap lebih dari 400 warga sipil, melukai 3000 orang lainnya dan menghancurkan lebih dari 75 ribu rumah warga. (Srikandi, 2008) Pemerintah Sri Lanka pun akhirnya meminta India menarik pasukannya kembali pada tahun 1990.

Tak lama setelah pasukan India meninggalkan Sri Lanka, LTTE kembali menguasai daerah utara Jaffa dan konflik yang dijuluki '*Second Eelam War*' pun dimulai. (Sirilal, 2009) lalu pada Mei 1991,

Perdana Menteri Rajiv Gandhi terbunuh akibat bom bunuh diri. Tak lama berselang, Presiden Premadasa dibunuh saat perayaan Hari Buruh. Kedua kejadian tersebut diduga oleh LTTE, meskipun tidak mengklaim bahwa mereka yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Upaya perdamaian kembali dilakukan di masa pemerintahan Presiden Chandrika Bandaranaike Kumaratunga melalui dialog dengan LTTE di tahun. LTTE setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan beberapa syarat. Namun, pemerintah tidak sanggup mengabdikan keinginan LTTE yang membuat kepercayaan terhadap kesungguhan pemerintah untuk berdamai dengan LTTE pun hilang.

Selain India, melalui Wakil Menteri Luar Negerinya Liam Fox, Inggris berinisiatif untuk menyelesaikan konflik ini. Pada tahun 1997, Inggris ditunjuk sebagai mediator yang menengahi perundingan antara kedua belah pihak yang bertikai. Namun perundingan tersebut gagal terlaksana, karena tidak adanya lagi rasa saling percaya dari kedua belah pihak. Lalu setahun setelahnya, Sri Lanka mengundang Norwegia untuk menjadi fasilitator dalam perundingan perdamaian. Upaya Norwegia yang dilakukan bertahap hingga tahun 2000 tidak sia-sia. Terlihat itikad baik dari kedua belah pihak untuk segera berdamai. Hal ini terbukti dari keputusan gencatan senjata secara sepihak yang diberlakukan oleh LTTE pada 19 Desember 2001. Keputusan yang sama diambil oleh pemerintah pada tanggal 21

Desember. Keduanya pun pada akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata serta sepakat mencari jalan tengah bersama.

Di tahun 2002, dalam rangka menyelesaikan konflik, dibentuklah *Sri Lanka Monitoring Mission* (SLMM) yang bertugas memantau dan menjaga agar kesepakatan gencatan senjata tetap dipatuhi oleh kedua belah pihak. Negosiasi berlangsung enam putaran hingga Maret tahun 2003. Namun di kala perdamaian hampir bisa diraih, kedua belah pihak mulai melanggar kesepakatan gencatan senjata dan akan berdampak negatif pada iklim negosiasi. Pelanggaran yang dilakukan berupa penculikan, rekrutmen anak-anak, pembunuhan serta gangguan keamanan. Akhirnya LTTE memutuskan untuk keluar dari negosiasi perjanjian damai tersebut.

Setelah tsunami yang terjadi tahun 2004, yang berdekatan dengan pemilihan presiden, hak pilih dari LTTE di hilangkan tanpa motif yang jelas. Presiden baru juga berjanji untuk melakukan negosiasi ulang dengan bantuan PBB. Dalam negosiasi itu, pemerintah menolak pemberian otonomi khusus pada etnis Tamil dan menolak untuk berbagi bantuan tsunami dengan LTTE. Sementara LTTE, bersikeras untuk segera mendapatkan kejelasan status mereka dengan ancaman akan kembali memukul gendring perang jika tidak ada itikad baik dari pemerintah. Dan akhirnya perang kembali terjadi.

Perundingan demi perundingan gagal dilakukan karena kedua belah pihak tak lagi saling percaya. Hingga pada tahun 2008,

pemerintah memutuskan untuk mengakhiri jalan perundingan dan memulai perdamaian dengan kekuatan militer. Bahkan ketika LTTE menawarkan kembali adanya perundingan, pemerintah menolak dengan tegas. Peningkatan kekuatan militer dilakukan dan pada bulan Agustus, tentara Sri Lanka berhasil menerobos salah satu markas besar LTTE di wilayah hutan Wannu. LTTE membalas dengan bom bunuh diri dan menewaskan 27 orang.

Konflik berakhir di bulan Mei 2009 ketika militer Sri Lanka berhasil mengepung LTTE di markasnya dan membunuh pimpinan mereka. LTTE kemudian menyerah dan konflik selama 26 tahun pun akhirnya selesai.

B. Geografi Sri Lanka

Sri Lanka merupakan negara yang berada di wilayah Samudera Hindia dan berada di bagian Selatan dari Benua Asia. Terletak di antara 5° LU- 10° LS dan 79° BT- 82° BT. Luas negara ini adalah $62,702 \text{ km}^2$. Menurut *Asian Disaster Reduction Center (ADRC)* (2011), wilayah tengah dari negara ini kebanyakan berupa pegunungan dengan tinggi lebih dari 2,5 km.

Secara umum, Sri Lanka dikelilingi oleh pantai (Valnet Inc., 2017). Sebagian besar wilayah Sri Lanka terdiri dari dataran rendah, namun di bagian tengah dan di selatan negara ini, terdapat beberapa dataran tinggi dan pegunungan. Iklim di Sri Lanka adalah tropis, kecuali

di wilayah bagian selatan yang beriklim basah dengan musim hujan di antara bulan April hingga Juni dan Oktober hingga November. Bagian utara merupakan daerah yang paling kering dengan curah hujan berada di antara bulan Desember hingga Februari. Rata-rata temperatur udara di Sri Lanka ada di kisaran 28°C-31°C setiap tahunnya. (Briney, 2017)

Hal penting yang perlu diketahui tentang kondisi geografi Sri Lanka adalah bahwa letaknya yang berada di Samudera Hindia membuat negara ini rentan terkena bencana alam, baik gempa bumi maupun tsunami. Sri Lanka pernah merasakan dahsyatnya bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 bersama dengan 12 negara Asia lainnya. (Briney, 2017)

C. Demografi Sri Lanka

Populasi penduduk di Sri Lanka hingga tahun 2015 adalah 20,9 juta jiwa dengan populasi perempuan sebanyak 51% dibanding laki-laki (World Bank Open Data, 2015). Etnis-etnis yang menghuni Sri Lanka diantaranya adalah Sinhala yang merupakan etnis mayoritas, disusul oleh etnis Tamil, dan Arab. Etnis Arab sendiri berasal dari para pedagang Arab yang datang ke Sri Lanka pada abad ke-8 Masehi. Selain ketiga etnis utama tadi, terdapat Burghers yang merupakan komunitas penduduk keturunan Eropa, imigran asal India bagian barat yang disebut Parsis, dan Veddas (Arasaratnam & Peiris, 2017).

Bahasa utama negara ini merupakan bahasa Sinhala yang kemudian diikuti oleh bahasa Tamil dan Inggris. Sementara berkaitan

dengan agama, mayoritas warga negara Sri Lanka merupakan pemeluk agama Buddha dengan angka sekitar 70%, dilanjutkan dengan 13% beragama Hindu, 10% Muslim, dan 7% Kristen (Sri Lanka 2015 International Religious Freedom Report, 2015).

D. Pemerintahan Sri Lanka

Sri Lanka merupakan negara berbentuk Republik yang menganut sistem parlemen unikameral atau satu kamar. Presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang dipilih lewat pemilu. Masa jabatan seorang presiden adalah 6 tahun dan maksimal menjabat 2 putaran berturut-turut. Kekuasaan eksekutif diberikan kepada presiden untuk mengadakan, menunda, atau mengakhiri sidang dan membubarkan parlemen. Presiden memiliki hak untuk memilih perdana menteri, yang merupakan pemimpin dari partai mayoritas di parlemen., yang juga bertugas sebagai wakil presiden. Atas saran perdana menteri, presiden bertanggung jawab atas pengangkatan kabinet dan anggota parlemen. (Country Profile, 2011)

Parlemen sendiri beranggotakan 225 orang yang dipilih berdasarkan yang memiliki masa jabatan 5 tahun. 225 anggota ini terdiri dari 196 36 kursi untuk perwakilan di 9 provinsi dimana masing-masing provinsi memiliki 4 hak kursi. 160 kursi lainnya dialokasikan ke *electoral district* dimana kursi setiap distrik akan ditentukan oleh komisi pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. Kemudian 29 kursi terakhir diberikan

kepada *National List Member of Parliament* yang dipilih oleh partai politik yang biasanya juga merupakan anggota partai politik atau kelompok kepentingan lainnya. (Country Profile, 2011)

E. Perekonomian Sri Lanka

Sektor agraris telah memainkan peran pentingnya bagi perekonomian Sri Lanka selama berabad-abad. Sebelum masa pendudukan Eropa di wilayah ini, padi merupakan komoditas utama Sri Lanka. Kemudian sejak masa penjajahan oleh bangsa Eropa, ekonomi Sri Lanka sebagian besar ditopang oleh sektor perkebunan, terutama kayu manis dan rempah-rempah lainnya. Hal ini disebabkan rempah-rempah merupakan komoditas ekspor yang sangat diperlukan bagi negara-negara di Eropa.. Saat kopi yang sempat menjadi produk andalan di tahun 1830-an terpuruk karena hama, teh pun muncul menggantikan.

Teh Sri Lanka merupakan teh hitam dengan kualitas sangat baik yang disebut *Ceylon Tea*. Produk ini kebanyakan di ekspor ke Inggris, Rusia, dan kawasan Timur Tengah. Setelah teh, disusul oleh karet yang mulai dikembangkan di akhir abad ke-19. Perkembangan tanaman karet sangat dipengaruhi oleh permintaan industri mobil di wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara (Federal Research Division Library of Congress, 2006). Persaingan karet dengan karet sintetis membuat harga karet alam sempat turun. Namun, dengan ikut naiknya harga bahan baku karet sintetis, ada

celah peningkatan harga bagi produk karet alam. Selain teh dan karet, komoditas ekspor andalan lainnya adalah kelapa. Sebagian besar produksinya digunakan untuk kebutuhan pasar domestik, mengingat sebagian besar hidangan makanan di Sri Lanka menggunakan bahan olahan kelapa, seperti santan. Produk yang biasanya di ekspor sendiri berupa minyak kelapa dan kopra.

Konflik 3 dekade membuat kontribusi kedua sektor ini turun dari 30% pada tahun 1970 ke angka 21% di tahun 2000 untuk pertanian dan 11.5 % di tahun 1970 menjadi 5% di tahun 2000 untuk perkebunan. (Sri Lanka - Agriculture, 2011) Meskipun begitu, pertanian dan perkebunan masih menjadi sektor penting diawal tahun 2000-an. Namun semakin mendekati fase akhir konflik, sektor pertanian dan perkebunan semakin memburuk karena perusakan dan pembakaran lahan pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik sebagai bentuk serangan maupun balas dendam.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, sektor pertambangan juga menjadi sektor ekonomi yang ada di Sri Lanka. Pertambangan yang paling unggul adalah permata. Industri permata sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan Portugis. Awalnya, ketika muncul di sekitaran tahun 1942, industri permata belum dikelola secara serius oleh pemerintah sehingga pengaruhnya terhadap ekonomi Sri Lanka masih sangat terbatas. Pemerintahan kolonial pada saat itu tidak tertarik untuk mengembangkan

industri tersebut karena dianggap sebagai sektor ekonomi yang tidak stabil jika dibandingkan dengan perdagangan rempah-rempah. Mereka pun lebih suka jika industri ini dipegang oleh sektor swasta. Bahkan, sektor ini sempat dikendalikan oleh Muslim Arab, baik secara langsung maupun membeli dari para penambang yang kebanyakan merupakan etnis Sinhala.

Baru pada 1972, pemerintah mendirikan *State Gem Corporation (SGC)* yang pada tahun 1993 dirubah menjadi *National Gem and Jewelry Authority (NJGA)* yang mengatur perdagangan permata dan kemudian membantu meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Sri Lanka meskipun sempat menurun akibat munculnya ekspor permata ilegal serta praktik pemalsuan permata Sri Lanka dengan permata asal Thailand. Sri Lanka sempat menjadi satu dari 5 negara produsen permata terbaik di dunia kala itu (Herath, 1999).

Sementara sektor ekonomi utama tengah lesu karena imbas konflik, pariwisata memegang peranan yang cukup penting sebagai penyumbang devisa bagi negaranya di awal periode pasca konflik. Sektor ini sebenarnya telah mendapat perhatian pada tahun 1966 ketika badan terkait didirikan. Namun ketika belum sempat menunjukkan pencapaian yang signifikan, pariwisata juga mengalami penurunan akibat perang sipil di Sri Lanka. Hal ini menyebabkan pengunjung enggan datang ke Sri Lanka dan lebih memilih Maldives dan Goa di India sebagai penggantinya. Fluktuasi pun terjadi selama masa perang, namun 2009 menjadi

momentum baru bagi pariwisata Sri Lanka karena di tahun tersebut, konflik telah usai.

Di bab selanjutnya, akan dipaparkan lebih lengkap bagaimana kondisi pariwisata Sri Lanka di tiga kondisi. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebelum, selama, dan setelah konflik etnis di Sri Lanka. Di bab selanjutnya juga akan dipaparkan data tentang jumlah kunjungan wisatawan yang menggambarkan bagaimana fluktuasi yang terjadi di tiga momen tersebut.